

Latar Belakang

Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem manajemen pemerintahan.



Tujuan

Umum

Secara umum, optimalisasi penataan administrasi melalui standar mutu pelayanan (SIANDALAN) bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Unit Pelaksana Teknis dibawahnya serta pelaksana Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan guna memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian target/sasaran prioritas Bangsa Kencana.

Khusus

Tujuan yang ingin dicapai pada aksi perubahan ini adalah:

Pemanfaatan SOP yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang ada di lingkungan Unit Pelaksana teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang

Terlaksananya tata Kelola administrasi yang optimal demi meningkatkan standar mutu pelayanan yang lebih baik.

Manfaat



Bagi DPPKB & UPT DPPKB

Terlaksananya tata Kelola administrasi yang optimal demi meningkatkan standar mutu pelayanan yang lebih baik. Penetapan Standar Operasional Prosedur menjadi acuan untuk setiap satuan kerja Pengawas di Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tangerang

1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat.
2. Meminimalisir kesalahan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat
3. SOP Digitalisasi Bisa diakses dimanapun tanpa harus datang ke Dppkb
4. SOP Digitalisasi Terlihat Lebih Menarik dan Lebih Mudah di pahami



Bagi Balai Penyuluhan KB



Bagi Masyarakat

1. Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang diberikan oleh UPT DPPKB
2. Menjamin keseragaman pelaksanaan pelayanan masyarakat di semua wilayah kerja UPT DPPKB.

Bagi Stakeholder

Bagi stakeholder (Dinas Kesehatan, Asosiasi Klinik Indonesia Cabang Kabupaten Tangerang, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)) :

1. Menjamin kerjasama agar Pembangunan Keluarga Berencana dapat terwujud
2. Meningkatkan akuntabilitas pelayanan sesuai standar mutu pelayanan
3. Mewujudkan pelayanan yang berorientasi kepada manajemen mutu yang ada

